**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON**

**IDENTITAS PEMOHON**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.*

1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Pemohon menjelaskan bahwa:*

*Pemohon adalah:*

1. *Partai Politik peserta Pemilu dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
2. *Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*
3. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.*

1. **POKOK PERMOHONAN**

**PROVINSI\*... (\*diisi sesuai dengan nama Provinsi yang diajukan oleh Pemohon)**

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD)* *menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) disertai alat bukti**hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

**V. PETITUM**

1. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
2. *Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD).*
3. *Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik/Calon anggota DPR dan DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*

*-Kop surat logo partai politik peserta Pemilu -*

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..........

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .............................................................................

Jabatan : Ketua Umum/Presiden *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu)* Partai...................................

Alamat Kantor : ..............................................................................

..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email ..................................................................

NIK : ........................................................... *(sesuai KTP)*

2. Nama : ..............................................................................

Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu)* Partai ........................

Alamat Kantor : ..............................................................................

..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email ..................................................................

NIK : ........................................................... *(sesuai KTP)*

bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) ... dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan:

1. …,
2. …,
3. *dst*,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

1) …,

2) …,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP… *email*: …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ............................................................. **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ......................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari…, tanggal… Mei 2019 pukul…, WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal… Mei 2019;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.
7. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang ... (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal …, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut …;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal … Mei 2019;
12. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor … tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal … Mei 2019 pukul … WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal… Mei 2019, pukul … WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

* 1. **PROVINSI...**
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

* + - 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

* + - 1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak*… *suara dikarenakan ... (bukti P-…,).*
      2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-…,).*
      3. *dst.*
      4. **DAPIL..dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]*
    1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

* + - 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-…).*
3. *dst.*
   * + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

* + - 1. **DAPIL ...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-…).*
3. *dst..*
   * + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

* + - 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-…).*
3. *dst.*
   * + 1. **DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

* + - 1. **KABUPATEN/KOTA...**
         1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-…).*
3. *dst.*
   * + - 1. **DAPIL... *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
       1. **KABUPATEN/KOTA...**
          1. **DAPIL...**
          2. **DAPIL...*dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

* + - 1. **KABUPATEN...**
         1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-…).*
3. *dst.*
   * + - 1. **DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*
       1. **KABUPATEN/KOTA...** 
          1. **DAPIL...**
          2. **DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*
   1. **PROVINSI..., *dst*.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)].*

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal…, Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan…,…,…, dst (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan…,…,…, dst (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan…,…,…, dst (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
   1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...** 
      1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL ...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**KABUPATEN/KOTA..., dst** *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA…**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara** |
|
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPIL..., dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)
      3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.